

Judul : Rakyat mesti bersatu kawal hak angket
Tanggal : Minggu, 03 Maret 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Rakyat Mesti Bersatu Kawal Hak Angket

Dukungan masyarakat sipil dibutuhkan untuk menambah kekuatan parpol melawan kubu yang menolak hak angket.

INDRIYANI ASTUTI

indriyani@mediaindonesia.com

PARTAI politik (parpol) pendukung dua kubu pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD diklaim sudah siap untuk mengajukan hak angket. Namun, dukungan masyarakat sipil juga mesti dikonsolidasikan untuk mengawal sekaligus menambah kekuatan melawan kubu penentang hak angket.

Hal itu ditegaskan politikus dan budayawan Eros Djarot saat merespons kesediaannya men-

jembatani kubu paslon 1 dan 3 untuk mengusulkan hak angket terkait dengan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Saya berani mengatakan kalau saya enggak dibohongi bos-bos (partai) itu, semua sudah siap. Cuma permasalahannya di sana (kubu yang menolak hak angket digulirkan) siap untuk menggagalkan," ujar Eros dalam diskusi *Rethinking Indonesia: 'Pemilu Terburuk dalam Sejarah Indonesia, Akankah Kita Terpuruk?'* yang digelar di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pihak-pihak yang berada di belakang kubu yang menolak punya massa yang besar.

Permasalahannya, ujar Eros, apakah partai politik yang akan mengusulkan hak angket berani melawannya.

"Massanya gede-gede," ujar Eros.

Ia juga menegaskan pentingnya dukungan masyarakat sipil. Masyarakat jangan mau hanya dijadikan objek, tapi menjadi subjek perubahan untuk menegakkan demokrasi. "Ego-ego sektoral hilangkanlah. Antarmasyarakat. Kita harus menata kembali menu-runkan ego sektoral. Rakyat kita mari bersatu," tegas Eros.

Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk menanyakan hak angket. "Dukunglah civil society. Kita minta pertanggung-jawaban partai-partai. Saya sudah

telepon Hasto, 'tak antemi kowe kalau enggak jadi'," ungkapnya.

Di tempat terpisah, juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Seno Bagaskoro, mengatakan PDIP masih fokus pada pengumpulan bukti-bukti kecurangan dalam Pemilu 2024. Dia juga mengatakan saat ini PDIP masih terus menyiapkan bukti dan data sebelum mengambil langkah hak angket DPR.

"Proses (pengumpulan bukti) itu sedang berlangsung karena basis pengambilan keputusan kami dilakukan sembari mengumpulkan bukti-bukti. Banyak hal yang juga masuk dalam pencermatan kami sebelum mengambil langkah politik di DPR ataupun langkah hukum di MK," ujar Seno kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Cek ombak

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendro menilai pengajuan hak angket kecurangan pemilu bakal mulus jika suara partai peng-usungnya di DPR bisa mengalahkan koalisi pendukung Prabowo-Gibran. Jika sedikit, ia meyakini bakal kandas di tengah jalan.

Ia melihat saat ini partai tidak

mau gegabah dalam pengajuan hak angket itu. Strategi cek ombak dini-lainya sedang dilakukan. "Mereka saling menunggu, semacam wait and see juga," ucap Herry, kemarin.

Ia memprediksi keputusan pastinya baru mulai digerakkan ketika DPR selesai reses. "Pihak pengusul hak angket juga akan melihat kondisi lapangan, akan benar (dijalankan) jika pendukungnya banyak. Jika sedikit, ini akan dihitung ulang oleh pengusul," ujar Herry.

Sementara itu, keberanian PPP ikut mengajukan hak angket diragukan. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin meyakini pemerintah bakal melemahkan PPP jika berani ikut memprotes pemilu. "Kalau dia (PPP) mendukung hak angket, pasti akan digembosi, akan dilemahkan, dan akan mengalami banyak masalah, terutama dalam konteks petinggi-petingginya, bisa dicari kasus hukumnya," cetusnya.

Sebelumnya, diberitakan PPP akhirnya menyatakan sikap mendukung usulan hak angket DPR. Penegasan itu disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy, Rabu (28/2). (Dis/Can/X 3)